

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang dengan jumlah penduduk sebanyak 252.124.458 jiwa dengan luas wilayah 1.913.378,68 km dan kepadatan penduduk sebesar 131,76 jiwa/km (Depkes RI, 2014). Masalah yang terdapat di Indonesia adalah laju pertumbuhan penduduk yang relatif masih tinggi. Perkiraan penduduk pertengahan 2013 sebesar 248,8 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,48%. Laju pertumbuhan ditentukan oleh kelahiran dan kematian dengan adanya perbaikan pelayanan kesehatan menyebabkan tingkat kematian rendah, sedangkan tingkat kelahiran tetap tinggi hal ini menjadi penyebab utama ledakan penduduk di Indonesia (BPS, 2013).

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut akan berpengaruh kepada tingkat kehidupan dan kesejahteraan penduduk. Untuk menanggulangi masalah tersebut pemerintah telah mencanangkan program Keluarga Berencana (KB) sebagai program nasional (BKKBN, 2007). Program KB ini merupakan bagian integral dari perubahan nasional yang bertujuan melambangkan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Program KB saat ini sudah merupakan suatu keharusan dalam upaya menanggulangi pertumbuhan penduduk dunia umumnya dan Indonesia pada khususnya. Berhasil tidaknya kita melaksanakan program KB ini akan menentukan berhasil tidaknya dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia (Everett, 2008).

Program KB Nasional memiliki tujuan ganda yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk. Dalam upaya menjunjung keberhasilan program KB nasional yaitu tercapainya kondisi pertumbuhan penduduk seimbang.

Gerakan KB tahap kedua sekarang ini sedang berusaha meningkatkan mutu para pelaksana, pengelola dan peserta KB disemua lini lapangan baik di kota maupun di pedesaan. Begitu juga dengan para akseptor KB diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup tentang alat kontrasepsi yang digunakannya (Hartanto, 2002).

Penggunaan KB saat ini (cara modern maupun cara tradisional), meningkat dari 55,8% pada 2010 menjadi 59,7% pada 2013 dengan variasi antar provinsi mulai dari yang terendah di Papua 19,8% sampai yang tertinggi di Lampung 70,5%. Dari 59,7% yang menggunakan KB saat ini, 59,3% menggunakan cara modern, 51,9% menggunakan KB hormonal, dan 7,5% non hormonal. Penggunaan kontrasepsi menurut metodenya, 10,2% menggunakan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan 49,1% *Non-MKJP* (RISKESDAS, 2013).

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merupakan jenis kontrasepsi yang sekali pemakaiannya dapat bertahan selama 3 tahun sampai seumur hidup, jenis kontrasepsi ini diantaranya adalah IUD, Implant, MOW (Metode Operasi Wanita) dan MOP (Metode Operasi Pria) sedangkan yang termasuk dalam kategori *Non-MKJP* adalah suntik, pil, kondom (Sarwono, 2005).

Pada umumnya masyarakat memilih alat kontrasepsi *Non-MKJP*, sehingga MKJP seperti IUD, Implant, MOW (Metode Operasi Wanita) dan MOP (Metode Operasi Pria) kurang diminati. Pemerintah lebih menekankan penggunaan alat kontrasepsi MKJP karena dianggap lebih efektif dan angka kegagalannya lebih rendah dibandingkan dengan alat kontrasepsi pil, kondom maupun suntikan (Kusumaningrum, 2009).

Menurut data BKKBN pencapaian KB baru Jakarta Pusat yang dicapai sampai dengan November 2016 berjumlah 94.51. Berdasarkan penggunaan kontrasepsi menurut metodenya tercatat 84,45 menggunakan MKJP dan 98.56 yang menggunakan *Non-MKJP*, dengan rincian sebagai berikut: IUD 87.19, MOW 74.98, MOP 77.51, Implant 79,93, Suntik 119.05, pil 84.50, kondom 81.92. Di kecamatan Sawah

Besar, Jakarta Pusat sampai dengan November 2016 tercatat jumlah pencapaian KB baru sebanyak 77.54% yang menggunakan MKJP 61,67 dan *Non*-MKJP sebanyak 85.18, dengan rincian: IUD 59.96, MOW 130.67, MOP 21.21, implant 59.63, suntik 127.57, pil 60.16, kondom 41.44. Berdasarkan data tersebut diatas dapat dilihat bahwa masyarakat di kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat masih kurang berminat terhadap penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang bilang dibandingkan dengan *Non*-MKJP (BKKBN, 2016).

Banyak faktor yang mempengaruhi akseptor dalam hal pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Keputusan konsumen dalam metode alat kontrasepsi ini tergantung dari perilaku konsumen itu sendiri. Terdapat 3 faktor utama yang dapat mempengaruhi perilaku kesehatan seseorang yang sebelumnya dapat terbentuk karena pengaruh genetik dan lingkungan. Faktor tersebut adalah: Faktor predisposisi (*Predisposing factor*) mencakup pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi, persepsi. Selain itu faktor sosiodemografi juga merupakan faktor predisposisi perilaku seseorang meliputi status individu, umur, pendidikan, besar keluarga, pendapatan. Faktor pemungkin (*Enabling factor*) termasuk didalamnya keterampilan dan tersedianya sumberdaya pribadi, sarana dan prasarana kesehatan dan kemudahan untuk mencapainya. Faktor pendorong atau penguat (*Reinforcing*) yaitu faktor yang menentukan apakah tindakan kesehatan mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat termasuk petugas kesehatan. Dengan faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi akseptor dalam hal memilih alat kontrasepsi yang diinginkan (Green, 2005).

Tingkat ekonomi ikut mempengaruhi pemilihan pemakaian jenis alat kontrasepsi. Hal ini disebabkan karena untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi yang diperlukan akseptor harus menyediakan dana yang diperlukan. Walaupun jika dihitung dari segi ke-ekonomisannya, metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) lebih murah dibanding dengan alat kontrasepsi jangka pendek, tetapi kadang masyarakat melihatnya dari

berapa biaya harus dikeluarkan untuk sekali pasang saja. Jika patokannya adalah biaya setiap kali pasang, Mungkin alat kontrasepsi jangka panjang terlihat jauh lebih mahal, tetapi jika dilihat masa/jangka waktu penggunaannya, tentu biaya yang harus dikeluarkan untuk pemasangan alat kontrasepsi jangka panjang akan lebih murah dibandingkan alat kontrasepsi jangka pendek. Untuk sekali pemasangan alat kontrasepsi jangka panjang bisa aktif selama 3-5 tahun, bahkan seumur hidup/sampai masa menopause sedangkan alat kontrasepsi jangka pendek hanya mempunyai masa aktif 1-3 bulan saja, yang artinya untuk mendapatkan efek yang sama dengan alat kontrasepsi jangka panjang, seseorang harus melakukan 12-36 kali suntikan bahkan berpuluh puluh kali lipat (Saifuddin, 2003).

Sebelumnya, dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk Pemprov DKI telah memberikan pelayanan KB gratis kepada seluruh warga yang berdomisili di Jakarta. Kebijakan ini telah termaktib dalam Pergub DKI No.162 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Keluarga Berencana (KB). Namun, tidak bisa dipungkiri masih banyak pemikiran di masyarakat terkait pembiayaan medis untuk mendapatkan pelayanan KB di Puskesmas & RSUD. Hal ini dikarenakan sistem sosialisasi program KB gratis di masyarakat belum maksimal.

Adapun alat kontrasepsi yang dibenarkan menurut Islam adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan, bersifat sementara (tidak permanen) dan dapat dipasang sendiri oleh yang bersangkutan atau oleh orang lain yang tidak haram memandang auratnya atau oleh orang lain yang pada dasarnya tidak boleh memandang auratnya tetapi dalam keadaan darurat ia dibolehkan. Selain itu bahan pembuatan yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal, serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan (mudarat) bagi kesehatan.

Secara substansial KB tidak bertentangan dengan ajaran Islam bahkan merupakan salah satu bentuk implementasi semangat ajaran Islam dalam rangka mewujudkan sebuah kemashlahatan, yaitu menciptakan

keluarga yang tangguh, mawadah, sakinah dan penuh rahmah. Selain itu, kebolehan (mubah) hukum ber-KB, dengan ketentuan-ketentuan seperti dijelaskan diatas, sudah menjadi kesepakatan para ulama dalam forum-forum ke Islaman, baik pada tingkat nasional maupun Internasional (ijma'al-majami).

Para ulama yang membolehkan KB sepakat bahwa Keluarga Berencana (KB) yang dibolehkan syari`at adalah suatu usaha pengaturan/penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami-istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan (maslahat) keluarga.

Hukum KB secara prinsipil dapat diterima oleh Islam, bahkan KB dengan maksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang tangguh sangat sejalan dengan tujuan syari`at Islam yaitu mewujudkan kemashlahatan bagi umatnya. Selain itu, KB juga memiliki sejumlah manfaat yang dapat mencegah timbulnya kemudharatan. Bila dilihat dari fungsi dan manfaat KB yang dapat melahirkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan maka tidak diragukan lagi kebolehan KB dalam Islam.

Pandangan Islam mengenai keluarga berencana merupakan salah satu bentuk implementasi ajaran Islam betapa pentingnya sebuah kemaslahatan, yaitu menciptakan keluarga yang sejahtera, tangguh, sakinah, mawadah dan penuh berkah serta sejalan dengan syariat Islam. Dalam hal ini, tingkat ekonomi ikut mempengaruhi pemilihan serta kurangnya minat masyarakat terhadap penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang bilang dibandingkan dengan *Non-MKJP*.

Keadaan tersebut diatas mendasari peneliti ingin memperoleh gambaran mengenai “Hubungan Tingkat Ekonomi dan Pengetahuan KB Gratis Terhadap Pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat Tahun 2017 dan Tinjauannya Menurut Islam”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada Hubungan Tingkat Ekonomi dan Pengetahuan KB Gratis Terhadap Pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat Tahun 2017 dan Tinjauannya Menurut Islam.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana karakteristik responden mengenai pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat Tahun 2017?
2. Bagaimana gambaran penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kecamatan Sawah Besar Tahun 2017?
3. Bagaimana gambaran tingkat ekonomi responden di Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat Tahun 2017
4. Bagaiman gambaran pengetahuan tentang KB gratis di Kecamatan Sawah Besar Tahun 2017?
5. Bagaimana hubungan tingkat ekonomi terhadap Pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kecamatan Sawah Besar Tahun 2017?
6. Bagaimana hubungan pengetahuan KB gratis terhadap Pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kecamatan Sawah Besar Tahun 2017?
7. Bagaimana pandangan Islam mengenai hubungan tingkat ekonomi dan pengetahuan KB gratis terhadap Pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kecamatan Sawah Besar Tahun 2017?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui Hubungan Tingkat Ekonomi dan Pengetahuan KB Gratis terhadap Pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat Tahun 2017.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui karakteristik responden mengenai pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat Tahun 2017.
2. Mengetahui gambaran penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat Tahun 2017.
3. Mengetahui gambaran tingkat ekonomi di Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat Tahun 2017.
4. Mengetahui gambaran pengetahuan tentang KB gratis di Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat Tahun 2017.
5. Mengetahui hubungan tingkat ekonomi responden KB terhadap pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat Tahun 2017.
6. Mengetahui hubungan pengetahuan KB gratis terhadap pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat Tahun 2017.
7. Mengetahui pandangan Islam mengenai hubungan Tingkat Ekonomi dan Pengetahuan KB gratis terhadap pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat Tahun 2017.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Universitas Yarsi.
- b. Peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hubungan tingkat ekonomi dan pengetahuan KB gratis terhadap pemilihan MKJP di kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat tahun 2017.
- c. Sebagai bahan informasi atau masukan mengenai pemilihan alat kontrasepsi MKJP dan *Non*-MKJP.
- d. Mengembangkan informasi terkait tingkat ekonomi dan pengetahuan KB gratis terhadap pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
- e. Sebagai bahan masukan bagi civitas akademika Universitas Yarsi dan pembendaharaan penelitian di Universitas Yarsi.